

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SUMBERGONDO KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU

Ahmad Nawi, Asih Widi Lestari

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

E-mail: ahmadnawi93@gmail.com

***Abstrack:** Development in the desire by the community basically is the fulfillment of all the necessities of life. This is the condition felt by Indonesia. One of them does not fulfill the habitable living quarters. This research used descriptive method. The research aimed to find the results of research on the implementation of house program policies unfit for the improvement of people's welfare in Sumbergondo Village with various indicators in it, as well as the main elements that must be found in accordance with the points of the problem. The results showed; (1) Implementation of Policy of RS-RTLH on Improvement of Welfare Society produces policy system, good communication, Human Resources are qualified to accommodate all aspect, Dispotion society to such programs are responding positively and others are responding negatively, and a good Bureaucratic Structure ensures that all Sumbergondo Village programs are implemented; (2) Supporting factors of RS-RTLH for Community Welfare Improvement; (3) Inhibiting factors of the RS-RTLH for Increasing Community Welfare, were found. Lack of funding and lack of timeliness in implementation.*

Keywords: *Implementation, Social Rehabilitation, Welfare.*

Abstrak: Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Inilah kondisi yang dirasakan oleh Indonesia. Salah satunya tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak Huni. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian bertujuan menemukan hasil implementasi kebijakan program rumah tidak layak huni terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Sumbergondo dengan berbagai indikator di dalamnya, serta unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir masalah. Hasil penelitian menunjukkan; (1) Implementasi Kebijakan Program RS-RTLH Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat menghasilkan sistem kebijakan, komunikasi yang baik, Sumber Daya Manusia yang mampu mengakomodir segala aspek, Disposisi masyarakat terhadap program tersebut ada yang menanggapi positif dan ada juga yang menanggapi secara negatif, dan Struktur Birokrasi yang baik menjamin terselenggaranya seluruh program Desa Sumbergondo; (2) Faktor pendukung Program RS-RTLH Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; (3) faktor penghambat Program RS-RTLH Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat adalah kurangnya dana yang diberikan dan ketidak tepatan waktu dalam pelaksanaan.

Kata Kunci: *Implementasi, Rehabilitasi Sosial, Kesejahteraan.*

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari suatu negara demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Proses peningkatan kualitas hidup difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menciptakan gagasan-gagasan konstruktif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam membentuk dan menciptakan sumber daya manusia yang produktif, maka pembangunan sangat penting untuk dilakukan. Di mana pembangunan beresensi adanya perubahan yang diharapkan terjadi dalam dimensi kehidupan di masyarakat. Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Namun tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan masih ada

masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang baik, seperti adanya kemiskinan. Kemiskinan muncul dari adanya implikasi kesenjangan sosial.

Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, pengemis, gelandangan, keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, tuna susila, pengangguran, kejahatan, tingkat kesehatan yang rendah dan lain-lain.

Memiliki rumah layak huni adalah pemenuhan dasar bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H hasil amandemen ke IV, dijelaskan bahwa: *“Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”*.

Setiap rakyat Indonesia berhak untuk memiliki rumah. Oleh karena itu bahwasanya rumah adalah kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan mutu kehidupan, serta sebagai upaya pencerminan diri pribadi dalam peningkatan taraf hidup dan perwujudan dalam pembentukan watak, karakter, dan kepribadian bangsa.

Pemerintah sebagai penyelenggara telah membuat program-program yang berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan, dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Program-program yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya berfokus kepada bantuan stimulan usaha ekonomi produktif seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kelompok Usaha Bersama (KUBER), ataupun berbentuk bantuan tunai seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Raskin. Namun pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat miskin pun tidak luput dari perhatian pemerintah. Sehingga pada tahun 2011 pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

Pada dasarnya penyediaan tempat tinggal atau rumah di Indonesia adalah kewajiban perorangan, negara dalam hal ini membantu mengakses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar perumahannya secara adil dan merata. Sebagian Pemerintah Daerah telah menangani terkait persoalan perumahan prioritas pembangunannya. Umumnya kegiatan diarahkan pada stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni. Pemerintah Desa Sumbergondo melakukan fasilitasi penguatan program dan kelembagaan termasuk menyediakan bantuan fasilitas Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan pemukiman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Sumbergondo adalah salah satu Desa yang berada di sebelah selatan Lereng Gunung Arjuna. Dengan kondisi wilayah yang demikian, pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan secara nasional, maka kebijakan pemerintah desa sumbergondo pelaksanaan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Proses penelitiannya dengan mengumpulkan data dari sumber data primer dan sumber data skunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peneliti sendiri, panduan wawancara (*interview guede*) dan catatan lapangan (*field note*). penentuan informen peneliti menggunakan teknik *purposive* sampling dan *snowball* sampling yang meliputi perangkat desa dan masyarakat sumbergondo. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode diskriptif, dimana mendiskripsikan hasil data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut kemudian dicek kebenarannya dengan menggunakan triangulasi. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Menurut Moleong (2014:6) Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Definisi kebijakan menurut Nugroho (2012: 675) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sesuai dengan fokus permasalahan, yang menjadi standar atau pisau analisis untuk mengukur implementasi kebijakan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni RS-RTLH terhadap kesejahteraan masyarakat, yakni mencakup tiga komponen yaitu kebijakan, dan pelaksana program.

Sistem Kebijakan

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam kesejahteraan masyarakat di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu maka diperlukan empat komponen di antaranya:

Komunikasi

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2005:101). Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi dalam penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sumbergondo dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan oleh aparatur Desa Sumbergondo untuk mengkomunikasikan kebijakan ini kepada masyarakat, maka dalam penyampaiannya harus benar dan tepat agar masyarakat memahami sistem bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Pola komunikasi dalam implementasi kebijakan yang diberikan oleh aparatur Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu baik atau berhasil karena komunikasinya sampai kepada masyarakat yang bersangkutan meskipun ada beberapa kendala. Komunikasi yang baik sampaikan sekiranya masyarakat yang mengerti dan mudah di pahami tidak bertele-tele yang terpenting jelas dan gampang di mengerti. Hal tersebut akan menjadikan masyarakat faham dan nilai positif terhadap implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

SDM (Sumber Daya Manusia)

Pelaksana program tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya. Sumberdaya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, sebab tanpa adanya sumber daya manusia yang handal akan menjadi penghambat program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni tersebut dan implementasi kebijakan akan terkendala implementasi kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sumbergondo membutuhkan sumberdaya manusia yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Dengan demikian dari hasil wawancara dan observasi Sumber daya manusianya sangat baik dalam pelaksanaannya, memberikan pelayanan sesuai dengan aturan dengan baik walaupun dari segi

pendidikan sebagian masih minim, namun hal itu tidak menjadi pengaruh atau penghambat dalam pelaksanaan program dan pelayanan terhadap masyarakat, sumber daya manusia sangat penting demi kemajuan desa karena apabila sumberdayanya baik akan memberikan kesejahteraan yang baik pula kepada masyarakat.

Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-13) mengemukakan “kecendrungan-kecendrungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecendrungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Dengan demikian berdasarkan penyajian data dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan disposisi dalam implementasi kebijakan yang diberikan oleh aparatur desa sumbergondo kecamatan bumiayi Kota batu. Pengangkatan aparatur dalam implementasi kebijakan di pilih sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan lebih utama yang mampu di berbagai bidang. Pengangkatan Aparatur desa terkait dengan pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sudah sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan sesuai dengan tugasnya.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi diartikan tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Untuk mendukung kelancaran dari setiap program pemerintah desa yang telah di rancang maka pemerintah desa membuat sebuah struktur yang diketahui oleh seluruh badan pemerintahan desa untuk menunjang pembagian tugas dan fungsi dari adanya pembagian kerja yang telah diatur, seperti kaur pembangunan, kaur umum dan kaur keuangan yang membantu penyelenggaraan tugas tersebut.

Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Sumber Daya Manusia

Peralatan dan perlengkapan yang memadai dapat menjadi modal yang dapat diwujudkan pada setiap program dan tujuan lembaga pemerintah kearah yang lebih baik. Fasilitas fisik merupakan sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH).

Menurut Subarsono (2006:7) kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integrasi moralnya. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Dilihat dari Fasilitas, faktor pendukung sangatlah baik mempunyai potensi yang luar biasa, kemampuannya tidak diragukan lagi meskipun aparatur desa pendidikannya kurang memadai.

Faktor Penghambat Dalam Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak/hasil yang positif

bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Dimock dalam Tachjan (2006: 26) pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksana operasional, pengawasan serta penilaian.

Dari hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan program RS-RTLH di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada di dalam proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di Desa Sumbergondo.

Adapun faktor kendala yang ditemukan dalam implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya dana yang diberikan

Besarnya kisaran Dana dalam suatu proses pembangunan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan tersebut. Begitu juga dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ini, dimana keberhasilan suatu proses rehabilitasi juga ditentukan oleh besar kisaran Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program RS-RTLH.

Kurangnya Dana yang diberikan untuk merehabilitasi rumah menjadi faktor terkendalanya program tersebut, Mungkin tidak akan menjadi kendal bagi penerima bantuan yang memiliki sedikit tabungan untuk menambah kekurangan dari pembuatan rumah tetapi akan menjadi kendala apabila penerima tidak memiliki tabungan sehingga akan menjadi beban pemikiran bagi penerima karena harus mempersiapkan rumah sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah sulit.

2. Ketidak tepatan waktu dalam pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program RS-RTLH telah ditetapkan batas waktu untuk merehab rumah, yaitu 30 hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sumbergondo, ada sebagian penerima mengatakan waktu pelaksanaan RS-RTLH tidak cukup. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan dan keterlambatan datangnya bahan bangunan. Program RS-RTLH memiliki dua jenis, pertama untuk membangun rumah dari awal artinya rumah penerima yang dulu akan di bongkar dan yang kedua untuk rumah yang hanya di rehap saja atau diperbaiki mana yang sudah tidak layak digunakan, seperti atap rumah yang bocor.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sudah baik karena hasilnya telah dapat dirasakan masyarakat secara langsung meskipun dalam pelaksanaannya sendiri masih ada kekurangan, kelemahan dan hambatan yang terjadi.
2. Dengan adanya bantuan pemerintah dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ini, di lihat dari *efisiensi* pelaksanaan sudah baik. Bahwa bantuan pemerintah ini diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam *indikator responsivitas* sudah sangat baik tanggapan masyarakat dengan adanya program bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban tanggungan masyarakat.
3. Penerima bantuan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah desa sumbergondo, bahwasanya sasaran dalam program tersebut merupakan masyarakat yang benar-benar kurang mampu di desa sumbergondo.

DAFTAR PUSTAKA

AG. Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.

- Moleong, Lexy J. 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public policy*. Jakarta: Gramedia.
- Tachjan. 2006. *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Press.